



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## Membangun Kritisme Politik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Rizki Khaeratul Hisan<sup>1</sup>, Sadilla Aprilita<sup>2</sup>, Rila Selsi Niari<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Mataram, NTB, Indonesia, [riskikhaeratulhisan@gmail.com](mailto:riskikhaeratulhisan@gmail.com).

<sup>2</sup>Universitas Mataram, NTB, Indonesia, [sadillaaprilita46@gmail.com](mailto:sadillaaprilita46@gmail.com).

<sup>3</sup>Universitas Mataram, NTB, Indonesia, [rilaselsiniari22000@gmail.com](mailto:rilaselsiniari22000@gmail.com).

**Abstrak:** Artikel ini membahas peran penting pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif warga negara, khususnya di kalangan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana PKn dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan partisipasi politik yang bertanggung jawab. Melalui penyusunan artikel ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dengan merujuk pada berbagai jurnal yang telah dipublikasikan. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber guna menjawab pertanyaan penelitian serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membangun kritisme politik, dengan fokus pada kewarganegaraan dan peran politiknya, serta pentingnya pendidikan politik melalui PKn. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan isu-isu politik.

**Kata Kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan, kritisme politik, kesadaran politik, studi literatur.

**Abstract:** This article discusses the important role of citizenship education (Civics) in enhancing political awareness and active participation among citizens, particularly among students. The aim of this research is to describe how Civics can develop critical thinking skills and increase responsible political participation. Through the preparation of this article, it is hoped to enhance understanding by referring to various published journals. The method used is literature study, which is structured to collect and analyze information from various sources to answer research questions and identify existing knowledge gaps. The research findings indicate that citizenship education plays a role in fostering political criticism, focusing on citizenship and its political role, as well as the importance of political education through Civics. Thus, citizenship education serves not only as a means to understand rights and responsibilities as citizens but also as a tool to encourage active participation in the political process, which in turn can strengthen democracy and create a society that is more aware of political issues.

**Keywords:** Citizenship Education, political criticism, political awareness, literature study.

*Correspondence Address:	<a href="mailto:riskikhaeratulhisan@gmail.com">riskikhaeratulhisan@gmail.com</a>
--------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 June 2025	30 March 2026

## PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Secara bahasa kesadaran politik adalah gabungan dua buah kata yang berbeda jika dilihat dari segi makna. Kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa terhadap suatu persoalan peristiwa. Sementara politik dapat diartikan sebagai usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Jadi jika kata kesadaran dan kata politik disatukan menjadi kesadaran politik maka dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa tentang cara-cara atau usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling penting adalah menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Hak pilih memberikan warga negara kekuatan untuk memilih para pemimpin yang mewakili kepentingan mereka.

Dengan menggunakan hak pilih, warga negara dapat mempengaruhi kebijakan publik dan membentuk masa depan negara mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak pilih dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan umum sangatlah penting dalam membangun masyarakat yang berpartisipasi secara politik.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan melatih mahasiswa berpikir kritis, analitis, dan demokratis, guna mempersiapkan kehidupan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Somantri, 2001). PKn berperan penting dalam membentuk karakter dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa melalui tiga kompetensi: pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan (Somantri, 2001). Namun, keterampilan berpikir kritis mahasiswa masih tergolong rendah, dengan 86% mahasiswa berada pada kategori kurang atau tidak terampil (Rasmawan, 2017). Di abad ke-21, berpikir kritis menjadi keterampilan esensial untuk memecahkan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan capaian penting mahasiswa perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengembangan daya berpikir kritis mahasiswa melalui PKn, yang diharapkan menghasilkan generasi mampu menjaga eksistensi NKRI (Pahlevi, 2017). Penelitian Arif (2015) menunjukkan kontribusi PKn dalam membentuk karakter melalui: (1) integrasi nilai-nilai karakter bangsa dalam materi, (2) kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi, dan (3) pemanfaatan masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar.

Pendidikan politik memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran warga negara tentang pentingnya partisipasi politik. Dalam sistem pendidikan, warga negara harus diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta proses politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang kuat tentang politik, warga negara akan merasa lebih termotivasi dan siap untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Seperti yang diamanatkan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Menengah dan Dasar. untuk kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian memiliki cakupan sebagai berikut: Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

## METODE | METHOD

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah studi literatur. Menurut Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016), dalam *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*, mereka mendefinisikan studi literatur sebagai metode yang terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Selain itu, menurut Creswell, John W. (2014) studi literatur adalah suatu rangkuman tertulis yang mencakup artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang mendefinisikan teori serta

menyediakan informasi mengenai masa lalu dan masa kini untuk diorganisasikan berdasarkan topik dan dokumen yang diperlukan. .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION**

Istilah pendidikan kewarganegaraan beragam dan setiap negara memiliki nama tersendiri sesuai konteks dan kebutuhan yang dikembangkan. Di Indonesia, PKn sering diartikan sebagai pendidikan untuk membentuk pemahaman warga negara atau citizen education. Beberapa ahli juga menyamakan PKn dengan pendidikan politik, demokrasi, atau hak asasi manusia. Solusi yang diberikan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung terwujudnya politik di suatu negara adalah pendidikan kewarganegaraan. Namun pada kenyataannya, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di Indonesia belum begitu memberikan hasil memuaskan. Oleh karena itu, sangat perlu adanya persiapan untuk membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab.

Masyarakat yang memiliki hak berpikir, berpendapat, dan berserikat seharusnya mampu menjadi agen untuk mengontrol kinerja pemerintah, terutama dalam pendidikan kewarganegaraan (civic education) bertujuan memperkuat karakter (character education) masyarakat Indonesia, meningkatkan keterampilan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Warga negara yang bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara harus cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengembangkan politik yang merdeka, setara, dan beradab. Toleransi dan rasa tanggung jawab dalam pendidikan kewarganegaraan harus didukung oleh norma dan cara hidup yang demokratis (Widiyanto & Istiqomah, 2023).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenalkan siswa pada nilai-nilai politik yang menjadi pilar terpenting dalam pendidikan siswa demokratis di lingkungan sekolah dan masyarakat. Siswa berperan aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah dan memiliki tanggung jawab dengan mendukung serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Implementasi nilai-nilai politik dalam pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting (Juanda & Rahayu, 2019).

### **1. Kewarganegaraan Dan Peran Politiknya.**

Pendidikan politik ini bertujuan agar tercapainya tingkat partisipasi politik, meningkatnya kesadaran peran serta keikutsertaan dalam menjangkau pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Keberanian dalam menentukan diri secara otonom merupakan hal utama dalam pendidikan politik dalam rangka memperjuangkan politik di tengah-tengah diskursus konflik kepentingan-kepentingan politik. Maka aktivitas politik warga negara adalah dalam rangka memberikan pengaruh dalam rangka prosesi pengambilan dan keputusan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kesejahteraan umum. Dengan demikian pendidikan politik adalah dalam rangka mempersiapkan pribadi-pribadi masyarakat dalam perjuangan politik, guna mencapai penyelesaian politik yang paling menguntungkan bagi semua pihak, tanpa harus merugikan masyarakat luas dan banyak.

Sehingga, pendidikan politik dalam rangka untuk mengajak para warga negara subyek untuk ikut serta dalam berfikir, berdialog, aktif berbuat politik dengan variasi cara-cara yang memungkinkan untuk dicapai. Karena dengan cara-cara variasi akan lebih mudah untuk mencapai konsensus ketimbang terjerumus hanya kepada satu cara dalam pemecahan masalah politik. Lebih jelasnya bahwa pendidikan politik saat ini adalah berusaha dalam reorientasi dalam cara masyarakat untuk merasa, berfikir, berkehendak, yang dikaitkan dengan aksi dan perbuatan politik aktif guna mencapai kemajuan dan perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. demi kesejahteraan.

Peran pendidikan politik adalah untuk membentuk karakter warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan demokratis. Selain itu, pendidikan politik bertujuan agar warga negara lebih memahami situasi politik, terutama saat terjadi konflik, serta berani mengambil sikap tegas untuk memberikan kritik dan menghadapi situasi yang tidak sesuai. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Menurut Kartono (2009, hlm. 78), pendidikan politik adalah upaya belajar dan berlatih yang sistematis dalam mengatur aktivitas sosial dan membangun kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, pendidikan politik didefinisikan sebagai serangkaian usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran politik dan kenegaraan, yang bertujuan untuk mendukung kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus menjadi bagian dari proses perubahan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia saat ini, dengan tujuan menciptakan sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Dengan demikian, pendidikan politik adalah proses penanaman nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan secara sadar, terorganisir, terencana, dan berlangsung secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk membangun watak bangsa (*nation character building*).

Menurut Firmanzah (2008, hlm. 24), masyarakat saat ini telah mendapatkan pendidikan politik yang lebih luas dan lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan politik sangat didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses informasi. Proses pendidikan politik tidak hanya dilakukan melalui pemberian informasi dan pembelajaran di ruang kelas atau media massa, tetapi juga melalui internet, yang memudahkan masyarakat untuk mencari informasi dan berita terkait kehidupan politik. Menurut Maemonah (2012), pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memahami hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan dan peran politiknya merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam proses politik. Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Tujuan utama dari pendidikan politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pendidikan politik mendorong individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, pendidikan politik juga berperan dalam membangun kesadaran politik. Hal ini membantu individu memahami situasi politik yang ada, termasuk konflik dan tantangan yang dihadapi. Kesadaran ini penting agar warga negara dapat mengambil sikap yang tepat dan kritis terhadap kebijakan publik.

Pendidikan politik juga mendorong dialog dan diskusi di antara warga negara tentang isu-isu politik. Melalui dialog, masyarakat dapat mencapai konsensus dan solusi yang lebih baik untuk masalah yang dihadapi. Selain itu, pendidikan politik berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Warga negara memiliki peran penting dalam proses politik. Salah satu bentuk partisipasi yang paling langsung adalah melalui pemilu, di mana warga negara diharapkan untuk menggunakan hak suara mereka, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil juga menjadi sarana

bagi warga negara untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka, serta berkontribusi dalam advokasi kebijakan yang lebih baik. Warga negara juga memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah, yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, mereka dapat berperan dalam mendidik orang lain tentang hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi politik melalui seminar, lokakarya, atau diskusi publik.

Meskipun pendidikan politik memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya akses informasi. Meskipun akses informasi semakin mudah, masih ada segmen masyarakat yang kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan relevan tentang politik. Selain itu, politik identitas dapat menghalangi dialog yang konstruktif dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Apatisme politik juga menjadi tantangan, di mana banyak warga negara merasa bahwa suara mereka tidak berpengaruh. Pendidikan politik harus mampu mengatasi sikap ini dengan menunjukkan dampak nyata dari partisipasi politik. Kualitas pendidikan yang diberikan juga menjadi tantangan, karena pendidikan yang tidak memadai dapat menghasilkan warga negara yang kurang paham tentang hak dan kewajiban mereka.

Secara keseluruhan, pendidikan politik adalah elemen kunci dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berpartisipasi. Dengan meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif, pendidikan politik dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan politik yang efektif dan berkelanjutan.

## 2. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik

Menurut Mas'od (1986), pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang berfokus pada pembentukan nilai-nilai politik dan menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang ada. Pendidikan politik tidak hanya terbatas pada pengenalan peran individu dalam pemerintahan, tetapi juga dapat diterapkan di institusi pendidikan, di mana pendidikan politik lebih dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam konteks mata pelajaran PKn, pendidikan politik berfungsi untuk membina siswa agar menjadi warga negara yang paham politik.

Dengan demikian, upaya pendidikan politik menjadi sangat penting untuk mendidik individu agar memperoleh informasi, wawasan, dan pemahaman tentang sistem politik yang dapat memengaruhi persepsi politik mereka serta kepekaan terhadap fenomena politik di sekitar mereka. Selain itu, diharapkan warga negara memiliki kemampuan berpolitik yang memungkinkan mereka untuk bersikap kritis dan mencari solusi terhadap masalah politik yang dihadapi. Dengan demikian, pendidikan politik membentuk fondasi yang kuat bagi proses demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan politik dapat membangun sikap demokratis siswa di sekolah. Melalui mata pelajaran ini, guru berusaha menanamkan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kesadaran politik siswa (Bashori, 2018, hlm. 290).

Oleh karena itu, pendidikan politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran yang mengajarkan cara membentuk warga negara yang baik, yaitu individu yang terdidik secara politik, memiliki kesadaran politik, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah (Rahman, 2018).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dapat membentuk pandangan demokrasi pelajar di sekolah. Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, guru berupaya membentuk sikap pelajar dengan menanamkan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran politik mereka. Oleh karena itu, perlu disampaikan kepada siswa pemahaman tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, mengingat pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan untuk memahami politik, tetapi juga tahu bagaimana menerapkannya dalam tindakan politik (Santika, Purnawijaya, & Sujana, 2019).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari mata pelajaran dengan tujuan membentuk warga negara yang baik, demokratis, berkarakter dan mewujudkan cita-cita demokrasi dalam membangun bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan sarana yang tepat digunakan untuk mengenalkan partisipasi politik pada siswa. Pendidikan Kewarganegaraan yang mengembangkan partisipasi politik merupakan modal dasar bagi siswa itu sendiri agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berperan aktif dalam partisipasi politik yang bertanggungjawab demi tercapainya cita-cita demokrasi yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, peranan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, menengah pertama dan atas perlu dilakukan pengintegrasian agar pengenalan dan pemahaman terhadap partisipasi politik baik yang sifatnya teoritis maupun bagaimana praktik politik yang bertanggungjawab itu dilaksanakan oleh siswa dilingkungannya (Santika, 2022). Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan pemahaman siswa mengenai partisipasi politik sesungguhnya dapat dilihat dari capaian siswa terhadap kompetensi kewarganegaraan yaitu civic knowledge, civic disposition, dan civic skills dalam partisipasi politik yang bermutu dan bertanggungjawab.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan pemahaman siswa mengenai partisipasi politik sesungguhnya dapat dilihat dari capaian siswa terhadap kompetensi kewarganegaraan yaitu civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), civic disposition (sikap kewarganegaraan), dan civic skills (keterampilan kewarganegaraan) dalam partisipasi politik yang bermutu dan bertanggungjawab. Hal ini bertujuan supaya siswa dapat berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan dapat bertanggungjawab dalam melaksanakan kehidupan politik pada lingkungan sekitarnya.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang penting dalam rangka memberikan wawasan politik bagi siswa. Sehingga siswa diharapkan mampu memiliki sikap partisipatoris terhadap segala kegiatan politik yang adatindakan individu akan memperoleh kualifikasi dan makna.

Membangun kesadaran politik adalah bagian dari pendidikan politik yang ditanamkan melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran warga negara mengenai pentingnya partisipasi dalam politik. Melalui pendidikan, warga negara perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban mereka, serta proses politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang politik melalui sarana pendidikan di sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman mengenai partisipasi politik yang sesungguhnya, yang tercermin dari pencapaian mereka dalam kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan partisipasi politik yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Kesadaran politik yang dibangun melalui Pendidikan Kewarganegaraan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Siswa diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan ini tidak hanya berlaku secara teoritis, tetapi juga diarahkan untuk mempraktikkan sikap demokratis

dan partisipatif dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi materi Pendidikan Kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA, penting agar siswa memperoleh pemahaman yang bertahap dan komprehensif mengenai politik dan partisipasi sosial.

Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat dari pencapaian kompetensi siswa dalam hal pengetahuan kewarganegaraan, sikap, dan keterampilan yang mendukung partisipasi politik yang bermutu dan bertanggung jawab. Meski demikian, tantangan seperti kurangnya sumber daya, pelatihan guru yang memadai, dan lingkungan belajar yang kondusif perlu diatasi agar pendidikan ini berjalan optimal. Pemerintah dan masyarakat harus memberikan dukungan penuh untuk memperkuat pendidikan politik demi menciptakan generasi muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi.

### 3. Pentingnya Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan politik merupakan salah satu bentuk implementasi dari pendidikan politik yang memiliki beberapa fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: 1) sebagai sarana untuk membangun karakter bangsa, 2) sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik, 3) sebagai sarana untuk membentuk kader partai politik yang berkualitas dan berintegritas, dan 4) sebagai sarana untuk menginternalisasi ideologi Pancasila (Nurdiansyah, 2015).

Metode pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, yang dibagi menjadi tiga kategori: pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal (Handoyo dan Lestari, 2017). Pendidikan Kewarganegaraan berupaya mengembangkan kompetensi generasi muda, yang mencakup civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), civic skills (keterampilan kewarganegaraan), dan civic disposition (karakter kewarganegaraan) (Winarno et al., 2020). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mendorong partisipasi politik di kalangan mahasiswa.

Pendidikan politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk membentuk orientasi politik dan moral dalam diri individu, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kepentingan masyarakat dan negara. Pentingnya pendidikan politik bagi generasi penerus bangsa adalah untuk meningkatkan kesadaran politik. Semakin cepat seseorang mendapatkan pendidikan politik, semakin tinggi kesadaran politiknya untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pendidikan politik memiliki peran besar dalam mendidik generasi muda agar memahami konsep dan implementasi politik dengan baik.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan politik bertujuan untuk membangun generasi muda menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yang juga memiliki hubungan dengan literasi digital. Kriteria warga negara yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan adalah: 1) memiliki tingkat literasi digital yang tinggi terkait fenomena sosial-kemasyarakatan, 2) aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan, termasuk memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan publik, 3) bersikap kritis terhadap fenomena sosial berdasarkan data dan fakta, dan 4) memiliki kepedulian terhadap permasalahan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu, pendidikan politik yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat membantu generasi muda untuk memahami dinamika politik yang terjadi di dalam dan luar negeri. Dengan pengetahuan yang memadai tentang isu-isu global, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan konflik internasional, mereka dapat melihat bagaimana kebijakan pemerintah dan keputusan politik mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong mereka

untuk berpikir kritis dan analitis terhadap informasi yang mereka terima, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau propaganda yang dapat menyesatkan.

Lebih jauh lagi, pendidikan politik yang efektif dapat menciptakan lingkungan di mana generasi muda merasa memiliki suara dan peran dalam proses pengambilan keputusan. Ketika mereka terlibat dalam organisasi atau komunitas yang berfokus pada isu-isu sosial, mereka belajar untuk bekerja sama, bernegosiasi, dan berkompromi dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Ini adalah keterampilan penting yang akan berguna tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Dengan demikian, pendidikan politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membekali generasi muda dengan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Akhirnya, pentingnya pendidikan politik juga terletak pada kemampuannya untuk membangun rasa identitas dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa. Dengan memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang mendasari negara, generasi muda dapat lebih menghargai keberagaman dan persatuan yang ada di masyarakat. Hal ini akan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan politik yang tinggi.

## KESIMPULAN | CONCLUSION

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kritisisme politik di kalangan siswa. Melalui proses pembelajaran yang melibatkan diskusi, analisis, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat mengembangkan sikap kritis terhadap isu-isu politik yang ada di masyarakat. Meskipun saat ini keterampilan berpikir kritis siswa masih tergolong rendah, dengan pendekatan yang tepat dalam pengajaran PKn, diharapkan siswa dapat lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk generasi yang sadar politik dan bertanggung jawab.

## REFERENSI | REFERENCE

- Arif Baehaqi Dikdik. (2012). *Kontribusi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pengembangan Karakter Bangsa: Prospek dan Tantangan di Tengah Masyarakat yang Multikultural*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Pendidikan. Vol. 1(1).
- Dakhi. (2023). *Analisis Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik bagi Peserta Didik*. Attractive : Innovative Education Journal, 5(1).
- Dewi Lukita. (2022). *Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik*. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.12(2).
- Hasibuan Abdullah Hamdi, Patricia Eka, Kalda Saifana, Windita Zahra Deylla, Aulia Rahma, Julita Widiya. (2024). *Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Demokrasi*. Jurnal Pancasila and Civics Education. Vol. 3(3).
- Prayitno Budi Rahadi, Prayugo Arlis. (2022). *Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol. 3(3).
- Ramadhani Putri. (2024). *Peran Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Siswa*. Jurnal Kajian Sosial Humaniora. Vol. 1(1).

- Rasmawan Rahmat. (2017). *Profil Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa dan Korelasinya dengan Indeks Prestasi Akademik*. Jurnal Kimia dan Pendidikan. Vol. 2(2).
- Tunggal Sasana. (2023). *Membangun Kesadaran Politik Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Of Civic Education. Vol. 1(1).
- Wiratma Lanang Gusti, *Politik Pendidikan dalam Pengembangan Kesadaran Kritis dan Jati Diri*, Jurnal Politik Pendidikan (107 - 122).
- Widiatmaka Pipit, Muchtarom. Moh, Yuliandari Erna. (2023). *Pendidikan Politik Melalui Penguatan Literasi Digital dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol. 1.